

# Strategi Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Penangkapan Ikan Terhadap Regulasi Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

*Strategies for Improving Compliance of Fishing Vessel Industry with Fishing Regulations at Bungus Ocean Fishing Port*

**Ranti Anggraini Hasman<sup>1\*</sup>, Polaris Nasution<sup>1</sup>, Isnaniah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan,  
Universitas Riau, Pekanbaru 28293 Indonesia  
email: [Ranti.anggraini3322@student.unri.ac.id](mailto:Ranti.anggraini3322@student.unri.ac.id)

(Diterima/Received: 5 Oktober 2024; Disetujui/Accepted: 3 November 2024)

## ABSTRAK

Pelabuhan Perikanan merupakan penunjang utama bagi kegiatan perikanan tangkap di perairan laut, yang berperan penting dalam sistem Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan. Penurunan signifikan dalam pengurusan dokumen perizinan, seperti yang tercatat dalam Laporan Tahunan PPS Bungus 2021, dapat berdampak pada tingkat kepatuhan. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaku usaha kapal penangkap ikan dan merumuskan strategi peningkatan kepatuhan mereka dalam mendukung regulasi di PPS Bungus. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, dimana setiap subjek dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Analisis data menggunakan skala Likert dan metode SWOT, menghasilkan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya kelengkapan dokumen perizinan dan evaluasi solusi efisien untuk pemantauan kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kapal penangkap ikan yaitu (a). Meningkatkan kesadaran dan edukasi pelaku usaha kapal penangkap ikan tentang pentingnya kelengkapan dokumen perizinan pada keberangkatan kapal dan jenis alat penangkap ikan yang sesuai dengan SIPI; (b). Mengevaluasi dan mencari solusi yang efisien untuk memasang *transmitter* SPKP pada kapal di atas 30 GT dengan mempertimbangkan keterbatasan sumberdaya perikanan; (c). Membangun infrastruktur untuk *monitoring tracking* kapal sebagai langkah proaktif dalam mengatasi isu-isu strategis yang berpotensi mengancam kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.

**Kata Kunci:** Pelabuhan Perikanan, Kepatuhan Nelayan, Regulasi Perikanan.

## ABSTRACT

Fishing ports are the main support for capturing fisheries activities in marine waters, and they play an important role in the monitoring, control, and surveillance system. A significant decline in the processing of license documents, as recorded in the 2021 PPS Bungus Annual Report, may impact the level of compliance. The purpose of the study is to evaluate the level of compliance of fishing vessel business actors and formulate strategies to improve their compliance in supporting regulations at PPS Bungus. The research method used is a purposive sampling method, which is conducted by conducting direct observation in the field, where each subject is selected based on certain criteria. Data analysis using Likert scales and the SWOT method resulted in strategies that can be implemented to improve compliance, including increased awareness of the importance of completing licensing documents and evaluating efficient solutions for vessel monitoring. The analysis shows there are several strategies to improve the compliance of fishing vessel business actors, namely (a). Increase awareness and education of fishing vessel business actors about the importance of the completeness of licensing documents on the departure of the vessel and the type of fishing gear in accordance with the SIPI; (b). Evaluate and find efficient solutions to install SPKP transmitters on

vessels above 30 GT by considering the limitations of fisheries resources; (c). Building infrastructure for monitoring vessel tracking is a proactive step in addressing strategic issues that potentially threaten the sustainability of fish resources and the environment.

**Keywords:** Fishing Port, Fishermen Compliance, Fisheries Regulation

## 1. Pendahuluan

Menurut Gumilang *et al.* (2014) Pelabuhan perikanan merupakan pusat aktivitas ekonomi perikanan yang akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Pelabuhan perikanan sangat penting peranannya terhadap perikanan tangkap karena pelabuhan perikanan merupakan pusat perekonomian, hal itu dapat dilihat dari aktivitas pelabuhan yang dimulai ketika ikan selesai ditangkap sampai ketika akan dipasarkan.

Salah satu contoh pelabuhan perikanan di Indonesia adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Dalam laporan tahunan Pelabuhan Samudera Bungus (2021) ditemukan penurunan dalam penerbitan Surat Perizinan Berlayar sebesar 6,4% dan Penurunan Pelaporan *Logbook* sebesar 11,8% dari hal tersebut membuktikan bahwa masih ditemukan adanya ketidakpatuhan nelayan terhadap pengurusan dokumen perizinan yang akan berdampak kepada sumber daya perikanan di setiap tahunnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan nelayan adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha penangkap ikan dan menentukan dukungan pelabuhan perikanan terhadap tingkat kepatuhan serta merumuskan strategi peningkatan kepatuhan armada dalam mendukung pelaksanaan regulasi penangkapan ikan di PPS Bungus.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan dan mengetahui permasalahan terkait regulasi penangkapan yang berlaku di lingkup kelautan dan perikanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang timbul akibat ketidakpatuhan pelaku usaha penangkap ikan di Pelabuhan Samudera Bungus.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Juli 2023 yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Provinsi Sumatera Barat.

### 2.2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode *purposive sampling* dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, dimana setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan kriteria pertimbangan tertentu.

### 2.3. Prosedur

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan, hasil pengisian kuisioner oleh responden sebagai sampel dan hasil wawancara dengan responden baik dari pihak pelabuhan maupun dari pihak nelayan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait, studi literatur atau studi pustaka, data yang dimiliki oleh perusahaan, internet dan sumber lainnya. Adapun data primer yang dikumpulkan yaitu ketentuan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder yang diperlukan adalah kuisioner dan wawancara langsung oleh pihak terkait. Kegiatan wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak pengelola PPS Bungus dan nelayan.

Pada Penelitian ini dibutuhkan responden berjumlah 15 orang dan kelompok dibedakan menjadi 2 bagian yang terdiri dari pengawas perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 5 orang, nahkoda dan pemilik kapal sebanyak 10 orang.

### 2.4. Analisis Data

#### Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Penangkap Ikan

Tingkat kepatuhan pelaku usaha kapal penangkap ikan di PPS bungus dianalisis dengan menggunakan metode skoring 1-5 dengan parameter dan sub parameter yang mengacu pada peraturan Direktorat Jendral PSDKP nomor 12 Tahun 2017 tentang

petunjuk teknis pengawas perikanan yang dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Skala Likert Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Penangkap Ikan**

| No                                             | Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Penangkap Ikan                                                                         | Berdasarkan<br>12/PER-DJSDKP/2017 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A. Pemeriksaan Kapal saat Keberangkatan</b> |                                                                                                                     |                                   |
| 1.                                             | Pelaku usaha penangkap ikan melaporkan rencana keberangkatannya kepada pengawas perikanan                           | Pasal 7 ayat 1                    |
| 2.                                             | Kesesuaian kapal perikanan dengan SIPI/SIKPI                                                                        | Pasal 7 ayat 3 huruf a            |
| 3.                                             | Kesesuaian alat penangkap ikan                                                                                      | Pasal 7 ayat 3 huruf b            |
| 4.                                             | Kesesuaian alat bantu penangkapan ikan                                                                              | Pasal 7 ayat 3 huruf c            |
| 5.                                             | Kesesuaian fisik kapal perikanan                                                                                    | Pasal 7 ayat 3 huruf d            |
| 6.                                             | Kesesuaian komposisi anak buah kapal dengan <i>Crewlist</i>                                                         | Pasal 7 ayat 3 huruf e            |
| 7.                                             | Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut untuk kapal pengangkut ikan                                          | Pasal 7 ayat 3 huruf f            |
| <b>B. Pemeriksaan kapal saat kedatangan</b>    |                                                                                                                     |                                   |
| 1.                                             | Setiap kapal perikanan wajib melaporkan kedatangannya kepada pengawas perikanan dengan menunjukan dokumen perikanan | Pasal 10 ayat 1                   |
| 2.                                             | Kesesuaian kapal perikanan dengan SIPI/SIKPI                                                                        | Pasal 10 ayat 2 huruf a           |
| 3.                                             | Kesesuaian kapal perikanan dengan SLO asal                                                                          | Pasal 10 ayat 2 huruf b           |
| 4.                                             | Kesesuaian fisik kapal dengan SPB                                                                                   | Pasal 10 ayat 2 huruf c           |

### Strategi Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Penangkap Ikan

Menurut [Rangkuti \(2006\)](#) analisis matrik diperoleh berdasarkan hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai elemen penyusun faktor internal. Sedangkan faktor eksternal didapatkan berdasarkan komponen yang menyusunnya yaitu berupa peluang dan

ancaman. Adapun tahapan analisis SWOT adalah sebagai berikut: 1) Identifikasi strategi faktor internal berlandaskan 12/PER-DJSDKP/2017 yang dapat dilihat pada Tabel 2. 2) Identifikasi strategi faktor eksternal berdasarkan Laporan Tahunan PPS Bungus 2021. Dapat dilihat pada Tabel 3

**Tabel 1. Analisis Faktor Internal**

| No               | Analisis Faktor Internal                                                                                        | Berdasarkan<br>12/PER-DJSDKP/2017 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kekuatan</b>  |                                                                                                                 |                                   |
| 1.               | Pelaku usaha kapal penangkap ikan melaporkan rencana keberangkatannya kepada pengawas perikanan                 | Pasal 7 ayat 1                    |
| 2.               | Pelaku usaha kapal penangkap ikan melaporkan rencana kedatangan kepada pengawas perikanan                       | Pasal 10 ayat 1                   |
| 3.               | Pelaku usaha kapal penangkap ikan melaporkan bongkar muat ikan kepada pengawas perikanan                        | Pasal 10 ayat 4                   |
| 4.               | Adanya Unit Pelaksana Teknis Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan/Satuan Pengawasan Sumberdaya Perikanan. | Pasal 12 ayat 2                   |
| <b>Kelemahan</b> |                                                                                                                 |                                   |
| 1.               | Ketidaklengkapan dokumen Perizinan pada Keberangkatan Kapal                                                     | Pasal 10 ayat 2 (c)               |
| 2.               | Ketidaksesuaian jenis alat penangkap ikan dengan SIPI.                                                          | Pasal 10 ayat 5 (d)               |
| 3.               | Belum adanya transmitter SPKP bagi kapal diatas 30 GT.                                                          | Pasal 10 ayat 5 (f)               |
| 4.               | Belum adanya Monitoring tracking kapal sehingga tidak terindikasi adanya pelanggaran.                           | Pasal 10 ayat 6 (c)               |

**Tabel 2. Analisis Faktor Eksternal**

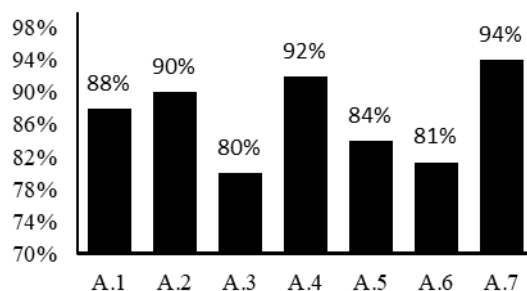
| No             | Analisis Faktor Eksternal                                                                            | Laporan Tahunan PPS Bungus 2022                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Peluang</b> |                                                                                                      |                                                             |
| 1.             | PPS Bungus memiliki Hubungan Kelembagaan dengan instansi terkait.                                    | BAB IV huruf G tentang Hubungan Kelembagaan (Hal.97)        |
| 2.             | Pelabuhan perikanan memiliki rencana strategis dalam 5 tahun kedepan                                 | BAB VIII tentang Rencana Pembangunan 2023. (Hal.141)        |
| 3.             | Adanya edukasi dan sosialisasi yang diberikan pihak pelabuhan kepada nelayan                         | BAB II tentang Perkembangan pelaksanaan kegiatan. (Hal. 9)  |
| 4.             | Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelabuhan untuk Peningkatan Pelayanan Masyarakat.     | BAB VI huruf B. (Hal.139)                                   |
| <b>Ancaman</b> |                                                                                                      |                                                             |
| 1.             | Produksi perikanan tangkap belum terlaksana secara optimal.                                          | BAB V tentang produksi perikanan (Hal. 105)                 |
| 2.             | Belum adanya docking untuk kapal diatas 30 GT.                                                       | BAB VI huruf A. (Hal.139)                                   |
| 3.             | Keterbatasan sumberdaya untuk implementasi                                                           | BAB V tentang Keragaan pelabuhan (Hal. 136)                 |
| 4.             | Terdapat beberapa isu strategis yang berpotensi mengancam kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan | BAB VIII tentang Rencana Pembangunan 2023 PAR. II (Hal 141) |

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Penangkap Ikan di PPS Bungus

Menurut [Zainuddin et al. \(2023\)](#)

Kepatuhan pelaku usaha penangkap ikan terhadap kapal keberangkatan merupakan faktor krusial dalam menjaga kelancaran operasional dan keberlanjutan kegiatan penangkapan ikan. Kepatuhan ini mencakup pemenuhan berbagai persyaratan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap keberangkatan kapal yang dapat meliputi aspek hukum, teknis, lingkungan, dan keamanan.

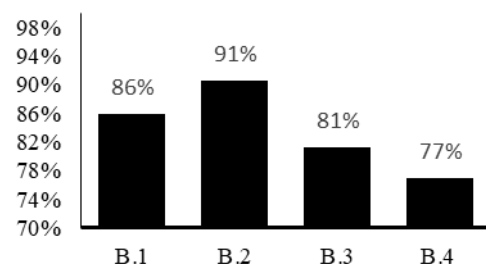


**Gambar 1. Tingkat Kepatuhan Kapal Keberangkatan**

Gambar 1, terlihat bahwa nilai rata-rata kepatuhan pelaku usaha kapal penangkap ikan tertinggi terdapat pada kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut, dengan nilai sebesar 94% dan nilai terendah yaitu pada kesesuaian alat penangkap ikan dengan nilai 80%. Hasil penelitian yang diperoleh dari responden terkait kepatuhan pelaku usaha kapal penangkap ikan terhadap pemeriksaan kapal keberangkatan menunjukkan tingkat

kepatuhan yang sangat kuat terhadap 7 indikator karena berada pada interval 80-100%.

Kepatuhan pelaku usaha penangkap ikan terhadap pemeriksaan kapal perikanan saat kedatangan merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan, efisiensi dan keberlanjutan kegiatan penangkapan ikan. Pemeriksaan kapal perikanan melibatkan pemenuhan persyaratan teknis, perawatan, dan keselamatan yang ditetapkan untuk memastikan kapal beroperasi dengan baik dan tidak menimbulkan risiko ([Matondang et al., 2023](#)).

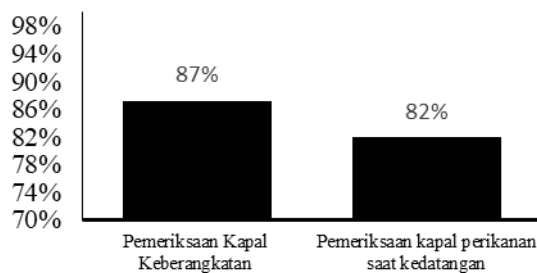


**Gambar 2. Tingkat Kepatuhan Kedatangan**

Gambar 2 terlihat bahwa nilai rata-rata kepatuhan pelaku usaha kapal penangkap ikan tertinggi terdapat pada kesesuaian kapal perikanan dengan dokumen SIPI/SIKPI dengan nilai 91% dan nilai terendah terdapat pada kesesuaian fisik kapal dengan SPB dengan nilai 77%. Hasil penelitian yang diperoleh dari responden terkait kepatuhan pelaku usaha kapal penangkap ikan terhadap pemeriksaan kapal perikanan saat kedatangan

menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat kuat terhadap 3 indikator, karena hasil perhitungan berada di interval 80% sampai dengan 100%. Dan tingkat kepatuhan yang kuat pada indikator 4 yaitu kesesuaian fisik kapal dengan SPB, karena hasil perhitungan berada di interval 61% sampai dengan 80%.

Hasil penilaian tingkat kepatuhan pelaku usaha kapal penangkap ikan di PPS Bungus disajikan pada Gambar 3.



**Gambar 3. Tingkat Kepatuhan Kapal Kedatangan**

### 3.2. Analisis SWOT

Rincian kriteria SWOT yang diperoleh dari penelitian merujuk pada faktor-faktor yang relevan yang telah diidentifikasi selama penelitian di PPS Bungus. Pengelolaan regulasi perikanan, terutama dalam konteks perikanan tangkap, dianggap sebagai proses evolusi yang berlangsung cukup lama (Fauzi, 2010).

Matriks Strategi Faktor Internal (IFAS) merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan pelaku usaha kapal penangkap ikan melalui faktor kekuatan dan kelemahan di pelabuhan perikanan samudera bungus. Penilaian bobot dan rating didapatkan dari kuisisioner dan disusun berdasarkan bobot tertinggi dan terendah yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Hasil perhitungan faktor-faktor strategi dalam tabel tersebut diperoleh jumlah skor kekuatan sebesar 2.99 dan faktor kelemahan sebesar 2.68 sehingga didapatkan total keseluruhan dari faktor strategi internal adalah sebesar 0,31.

**Tabel 3. Analisa SWOT Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Penangkap Ikan**

| No                    | Faktor Internal                                                                                                 | Bobot | Rating | Skor<br>(Bobot x Rating) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|
| <b>Kekuatan</b>       |                                                                                                                 |       |        |                          |
| 1                     | Pelaku usaha kapal penangkap ikan melaporkan rencana keberangkatannya kepada pengawas perikanan.                | 0.30  | 3.73   | 1.12                     |
| 2                     | Pelaku usaha kapal penangkap ikan melaporkan rencana kedatangannya kepada pengawas perikanan                    | 0.25  | 3.67   | 0.92                     |
| 3                     | Pelaku usaha kapal penangkap ikan melaporkan bongkar muat ikan kepada pengawas perikanan                        | 0.25  | 3.80   | 0.95                     |
| 4                     | Adanya Unit Pelaksana Teknis Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan/Satuan Pengawasan Sumberdaya Perikanan. | 0.20  | 3.93   | 0.79                     |
| SUBTOTAL              |                                                                                                                 | 1     |        | 2.99                     |
| <b>Kelemahan</b>      |                                                                                                                 |       |        |                          |
| 1                     | Ketidaklengkapan dokumen perizinan pada Keberangkatan Kapal.                                                    | 0.40  | 2.80   | 1.12                     |
| 2                     | Ketidaksesuaian jenis alat penangkap ikan dengan SIPI.                                                          | 0.35  | 3.13   | 1.10                     |
| 3                     | Belum adanya <i>transmitter</i> SPKP bagi kapal diatas 30 GT.                                                   | 0.15  | 3.07   | 0.46                     |
| 4                     | Belum adanya <i>Monitoring tracking</i> kapal sehingga tidak terindikasi adanya pelanggaran.                    | 0.10  | 3.27   | 0.33                     |
| SUBTOTAL              |                                                                                                                 | 1     |        | 2.68                     |
| TOTAL SKOR PEMBOBOTAN |                                                                                                                 |       |        | 0.31                     |

**Tabel 3. Matriks IFAS Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Penangkap Ikan**

| No                    | Faktor Internal                                                                                                 | Bobot | Rating | Skor<br>(Bobot x Rating) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|
| <b>Kekuatan</b>       |                                                                                                                 |       |        |                          |
| 1                     | Pelaku usaha kapal penangkap ikan melaporkan rencana keberangkatannya kepada pengawas perikanan.                | 0.30  | 3.73   | 1.12                     |
| 2                     | Pelaku usaha kapal penangkap ikan melaporkan rencana kedatangannya kepada pengawas perikanan                    | 0.25  | 3.67   | 0.92                     |
| 3                     | Pelaku usaha kapal penangkap ikan melaporkan bongkar muat ikan kepada pengawas perikanan                        | 0.25  | 3.80   | 0.95                     |
| 4                     | Adanya Unit Pelaksana Teknis Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan/Satuan Pengawasan Sumberdaya Perikanan. | 0.20  | 3.93   | 0.79                     |
| SUBTOTAL              |                                                                                                                 | 1     |        | 2.99                     |
| <b>Kelemahan</b>      |                                                                                                                 |       |        |                          |
| 1                     | Ketidaklengkapan dokumen perizinan pada Keberangkatan Kapal.                                                    | 0.40  | 2.80   | 1.12                     |
| 2                     | Ketidaksesuaian jenis alat penangkap ikan dengan SIPI.                                                          | 0.35  | 3.13   | 1.10                     |
| 3                     | Belum adanya <i>transmitter</i> SPKP bagi kapal diatas 30 GT.                                                   | 0.15  | 3.07   | 0.46                     |
| 4                     | Belum adanya <i>Monitoring tracking</i> kapal sehingga tidak terindikasi adanya pelanggaran.                    | 0.10  | 3.27   | 0.33                     |
| SUBTOTAL              |                                                                                                                 | 1     |        | 2.68                     |
| TOTAL SKOR PEMBOBOTAN |                                                                                                                 |       |        | 0.31                     |

Matriks strategi faktor eksternal (EFAS) merupakan alat yang digunakan untuk

mengidentifikasi tingkat kepatuhan pelaku usaha kapal penangkap ikan melalui faktor

peluang dan ancaman di pelabuhan perikanan samudera bungus. faktor peluang yang digunakan akan merujuk pada aspek positif yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan

sedangkan faktor ancaman yang digunakan akan merujuk kepada faktor yang menghambat tingkat kepatuhan. Matriks EFAS dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 4. Matriks EFAS Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Penangkap Ikan**

| No                           | Faktor Eksternal                                                                                     | Bobot    | Rating | Skor<br>(Bobot x<br>Rating) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|
| <b>Peluang</b>               |                                                                                                      |          |        |                             |
| 1                            | PPS Bungus memiliki Hubungan Kelembagaan dengan instansi terkait.                                    | 0,35     | 3,33   | 1,17                        |
| 2                            | Pelabuhan perikanan memiliki rencana strategis dalam 5 tahun kedepan.                                | 0,30     | 3,67   | 1,10                        |
| 3                            | Adanya edukasi dan sosialisasi yang diberikan pihak pelabuhan kepada nelayan                         | 0,20     | 3,47   | 0,69                        |
| 4                            | Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelabuhan untuk Peningkatan Pelayanan Masyarakat      | 0,15     | 3,87   | 0,58                        |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                                                                                      | <b>1</b> |        | <b>3,54</b>                 |
| <b>Ancaman</b>               |                                                                                                      |          |        |                             |
| 1                            | Produksi perikanan tangkap belum terlaksana secara optimal                                           | 0,35     | 3,20   | 1,12                        |
| 2                            | Belum adanya <i>docking</i> untuk kapal diatas 30 GT                                                 | 0,25     | 2,80   | 0,70                        |
| 3                            | Keterbatasan sumberdaya untuk implementasi                                                           | 0,25     | 3,07   | 0,77                        |
| 4                            | Terdapat beberapa isu strategis yang berpotensi mengancam kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan | 0,15     | 3,00   | 0,45                        |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                                                                                      | <b>1</b> |        | <b>3,04</b>                 |
| <b>TOTAL SKOR PEMBOBOTAN</b> |                                                                                                      |          |        | <b>0,50</b>                 |

Tabel 5 hasil perhitungan faktor-faktor strategi dalam tabel tersebut diperoleh jumlah skor peluang sebesar 3,54 dan faktor ancaman sebesar 3,04 sehingga didapatkan total keseluruhan dari faktor strategi eksternal adalah sebesar 0,50. Nilai tersebut dapat mengindikasikan kondisi eksternal yang memiliki peluang dan ancaman dalam kepatuhan

regulasi penangkapan ikan. Proses penentuan alternatif strategi berkaitan dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang akan berdampak terhadap nelayan. Perumusan strategi peningkatan pelaku usaha kapal penangkap ikan dengan matriks SWOT, disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Analisis SWOT**

| EFAS    | IFAS Kekuatan (S):                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | Kelemahan (W):                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Peluang (O):                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | Strategi (WO):                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peluang | 1. PPS memiliki Hubungan Kelembagaan dengan instansi terkait.                                           | 1. Peningkatan kolaborasi antara pelaku usaha kapal penangkap ikan dengan instansi terkait untuk memaksimalkan rencana strategis pelabuhan agar menciptakan pengawasan yang efektif dalam regulasi perikanan. (S1,O1,O2)                                   | 1. Mengatasi ketidaklengkapan dokumen perizinan pada keberangkatan kapal dengan memperkuat hubungan kelembagaan antara pelabuhan perikanan dan instansi terkait (W1,O1)                                                                                    | 1. Mengatasi ketidaklengkapan dokumen perizinan pada keberangkatan kapal dengan memperkuat hubungan kelembagaan antara pelabuhan perikanan dan instansi terkait (W1,O1)                                                                                    |
|         | 2. Pelabuan perikanan memiliki rencana strategis dalam 5 tahun kedepan.                                 | 2. Peningkatan kesadaran nelayan terhadap keberlanjutan sumberdaya perikanan dengan memanfaatkan data pelaporan dan bongkar muat ikan sebagai bahan dasar penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi kepada nelayan. (S2,S3,O3)                               | 2. Mengatasi ketidaklengkapan alat penangkap ikan dengan SIPI melalui implementasi rencana strategis pelabuhan dalam lima tahun ke depan. (W2,O2).                                                                                                         | 2. Mengatasi ketidaklengkapan alat penangkap ikan dengan SIPI melalui implementasi rencana strategis pelabuhan dalam lima tahun ke depan. (W2,O2).                                                                                                         |
|         | 3. Adanya edukasi dan sosialisasi yang diberikan pihak pelabuhan kepada nelayan.                        | 3. Adanya edukasi dan sosialisasi yang diberikan pihak pelabuhan kepada nelayan.                                                                                                                                                                           | 3. Mengatasi ketidaklengkapan <i>transmitter</i> SPKP dan <i>monitoring tracking</i> kapal dengan program edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak pelabuhan (W3,W4,O3,O4)                                                                  | 3. Mengatasi ketidaklengkapan <i>transmitter</i> SPKP dan <i>monitoring tracking</i> kapal dengan program edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak pelabuhan (W3,W4,O3,O4)                                                                  |
|         | 4. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelabuhan untuk Peningkatan Pelayanan Masyarakat      | 4. Meningkatkan kerjasama antara pelaku usaha kapal penangkap ikan dengan pihak pelabuhan untuk memanfaatkan akses yang baik terhadap sumberdaya perikanan (S4,O4)                                                                                         | 4. Meningkatkan kerjasama antara pelaku usaha kapal penangkap ikan dengan pihak pelabuhan untuk memanfaatkan akses yang baik terhadap sumberdaya perikanan (S4,O4)                                                                                         | 4. Meningkatkan kerjasama antara pelaku usaha kapal penangkap ikan dengan pihak pelabuhan untuk memanfaatkan akses yang baik terhadap sumberdaya perikanan (S4,O4)                                                                                         |
| Ancaman | 1. Produksi perikanan tangkap belum terlaksana secara optimal                                           | 1. Meningkatkan kolaborasi antara nelayan dan instansi terkait untuk memanfaatkan keberangkatan dan kedatangan sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan produksi perikanan tangkap yang lebih optimal. (S1,S2,T1)                                 | 1. Meningkatkan kesadaran dan edukasi pelaku usaha kapal penangkap ikan tentang pentingnya kelengkapan dokumen perizinan pada keberangkatan kapal dan jenis alat penangkap ikan yang sesuai dengan SIPI (W1,W2,T1).                                        | 1. Meningkatkan kesadaran dan edukasi pelaku usaha kapal penangkap ikan tentang pentingnya kelengkapan dokumen perizinan pada keberangkatan kapal dan jenis alat penangkap ikan yang sesuai dengan SIPI (W1,W2,T1).                                        |
|         | 2. Keterbatasan sumberdaya untuk implementasi                                                           | 2. Memanfaatkan keberadaan Unit Pelaksana Teknis Pengawas untuk meningkatkan advokasi dan upaya pengembangan pelabuhan termasuk penambahan fasilitas <i>docking</i> untuk kapal di atas 30 GT. (S4,T2)                                                     | 2. Mengembangkan keterampilan sumberdaya. (W3,T3)                                                                                                                                                                                                          | 2. Mengembangkan keterampilan sumberdaya. (W3,T3)                                                                                                                                                                                                          |
|         | 3. Terdapat beberapa isu strategis yang berpotensi mengancam kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan | 3. Meningkatkan kerjasama nelayan, pelabuhan perikanan, dan instansi terkait dalam pemanfaatan pelaporan bongkar muat ikan sebagai dasar perencanaan strategi untuk mencegah isu-isu strategis yang dapat mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan. (S3,T4) | 3. Meningkatkan kerjasama nelayan, pelabuhan perikanan, dan instansi terkait dalam pemanfaatan pelaporan bongkar muat ikan sebagai dasar perencanaan strategi untuk mencegah isu-isu strategis yang dapat mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan. (S3,T4) | 3. Meningkatkan kerjasama nelayan, pelabuhan perikanan, dan instansi terkait dalam pemanfaatan pelaporan bongkar muat ikan sebagai dasar perencanaan strategi untuk mencegah isu-isu strategis yang dapat mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan. (S3,T4) |
|         | 4. Terdapat beberapa isu strategis yang berpotensi mengancam kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan | 4. Meningkatkan kerjasama nelayan, pelabuhan perikanan, dan instansi terkait dalam pemanfaatan pelaporan bongkar muat ikan sebagai dasar perencanaan strategi untuk mencegah isu-isu strategis yang dapat mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan. (S3,T4) | 4. Meningkatkan kerjasama nelayan, pelabuhan perikanan, dan instansi terkait dalam pemanfaatan pelaporan bongkar muat ikan sebagai dasar perencanaan strategi untuk mencegah isu-isu strategis yang dapat mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan. (S3,T4) | 4. Meningkatkan kerjasama nelayan, pelabuhan perikanan, dan instansi terkait dalam pemanfaatan pelaporan bongkar muat ikan sebagai dasar perencanaan strategi untuk mencegah isu-isu strategis yang dapat mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan. (S3,T4) |

Matriks SWOT pada Tabel 6 diperoleh berdasarkan analisa dari faktor-faktor internal dan eksternal yang terdapat pada penerapan regulasi penangkapan ikan di PPS Bungus, selanjutnya analisis matriks SWOT ini bertujuan untuk merumuskan alternatif strategi peningkatan kepatuhan pelaku usaha kapal penangkap ikan di perairan sumatera barat dengan mamadukan antara hasil yang telah didapatkan dari matriks IFAS (*Internal Factor Strategy*) dan matriks EFAS (*Eksternal Factor Strategy*). Dan selajutnya adalah pembobotan dari hasil kuisoner yang dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Matriks IFAS dan EFAS**

|          | IFAS      | S = 2.99  | W = 2.68 |
|----------|-----------|-----------|----------|
| EFAS     |           |           |          |
| O = 3.54 | SO = 6.53 | WO = 6.22 |          |
| T = 3.04 | ST = 6.02 | WT = 6.58 |          |

Berdasarkan Tabel 7 urutan alternatif strategi SWOT, diperoleh hasil penjumlahan strategi 1 *Strength-Opportunity* (SO) sebesar 6.58, penjumlahan strategi 2 *Weaknesses-Threat* (WT) 6.53, penjumlahan strategi 3 *Weaknesses-Opportunity* (WO) sebesar 6.22 dan penjumlahan strategi 4 *Strength-Threat* (ST) sebesar 6.02. Maka prioritas utama alternatif berdasarkan perolehan bobot nilai yaitu *Weakness-Threat* yang menghasilkan bobot tertinggi. Strategi *Weakness-Threat* memiliki beberapa kebijakan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kesadaran dan edukasi pelaku usaha kapal penangkap ikan tentang pentingnya kelengkapan dokumen perizinan pada keberangkatan kapal dan jenis alat penangkapan sesuai dengan SIPI. 2) Mengevaluasi dan mencari solusi yang efisien untuk memasang *transmitter* SPKP pada kapal >30 GT dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya perikanan. 3) Membangun infrastruktur untuk *monitoring tracking* kapal sebagai langkah proaktif dalam mengatasi isu-isu strategis yang berpotensi mengancam kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian tingkat kepatuhan pelaku usaha kapal penangkap ikan di PPS Bungus dikategorikan sangat kuat untuk pemeriksaan kapal keberangkatan (87%) dan

Pemeriksaan kapal kedatangan (82%). Hasil dari rekapitulasi analisis SWOT didapatkan nilai WT (*Weakness-Threat*) dengan nilai tertinggi yaitu 6.58 dan yang terendah yaitu ST (*Strength-Threat*) dengan nilai 6.02. Berdasarkan hal tersebut maka ditemukan strategi yang dapat memperkuat pelaku usaha kapal penangkap ikan untuk dapat meminimalkan kelemahan agar bertahan dari ancaman.

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan studi mendalam terkait penurunan dokumen perizinan dan melakukan analisis perbedaan kepatuhan berdasarkan ukuran kapal atau klasifikasi kapal untuk dapat mengidentifikasi apakah faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan dalam kategori kapal tertentu.

#### Daftar Pustaka

- Fauzi, A. (2010). *Ekonomi Perikanan Teori Kebijakan dan Pengelolaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Gumilang, G., Solihin, S., & Wisudo, W. (2014). Pola Distribusi dan Teknologi Pengelolaan Hasil Tangkapan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Pantura Jawa. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 5(1):65-74
- Matondang, M., Suhaeni, S., Aling, A., Durand, D., & Dien, D. (2023). Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Administrasi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung. *Akulturas: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 11(1): 1-10.
- Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (2021). *Laporan Tahunan Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus*. KKP
- Peraturan Direktorat Jenderal PSDKP No.12 Tahun 2017. (2017). *Tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan*.
- Rangkuti F. (2006). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Zainuddin, Z., Karubaba, O.C., Permady, G.C., & Sumarta, R.P. (2023). Peningkatan Pelayanan Clearance Kapal Guna Menunjang Keberangkatan Kapal di Jetty Kilang Pertamina Internasional Kasim. *JPB: Jurnal Patria Bahari*, 3(2): 29-35